



<b>News Title</b> : Bappebti Blokir 1.855 Situs PBK Regal	
<b>Media Name</b> : Kedaulatan Rakyat	<b>Journalist</b> : Ant, San
<b>Publish Date</b> : 02 February 2024	<b>Tonality</b> : Positive
<b>News Page</b> : 8	<b>News Value</b> : 45,900,000
<b>Resources</b> : Kasan (Plt Kepala Bappebti ), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan)	<b>Ads Value</b> : 15,300,000
<b>Section/Rubrication</b> : Kedaulatan Rakyat	<b>Topic</b> : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

## Bappebti Blokir 1.855 Situs PBK Ilegal

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 1.855 situs web ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sepanjang 2023.

Plt Kepala Bappebti Kasan mengatakan, pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

"Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar. Untuk itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Kasan di Jakarta, Kamis (1/2).

Kasan menjelaskan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.

Ia berharap, masyarakat dapat berperan aktif untuk melaporkan ke Bappebti melalui saluran media sosial atau datang langsung bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK.

"Upaya tersebut merupakan bentuk ko-

laborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan," kata Kasan.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menegaskan, setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. "Entitas yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujar Aldison.

Situs web PBK ilegal yang telah diblokir Bappebti dapat dinormalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti. Langkah ini sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.

(Ant/San)-d